BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Analisis

Dalam proses penilaian sebaiknya dilakukan perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan (kontinyu), berkelanjutan, sejak dari tahap survei hingga tahap pengamatan. Dalam hal analisis kinerja keuangan, diperlukan peninjauan ulang atau pengkajian guna memberikan umpan balik dalam proses evaluasi.

Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002:52) adalah sebagai berikut :

> **"Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan".**

Adapun menurut Syahrul dan Mohammad Afdi Nizar (2000:48) analisis didefinisikan sebagai berikut :

> **"Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul".**

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati, dan memecahkan sesuatu (mencari jalan keluar) yang dilakukan oleh seseorang.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah tidak lepas dari pengelolaan pihak terkait. Masing-masing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya berbeda. Penilaian kinerja berasal dari penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan berdasarkan sasaran, standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan. Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja keuangan.

2.1.2.1 Pengertian Kinerja

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan.

Menurut The Scribner-Bantam English Dictionary yang dikutip oleh Sedarmayanti (2004:175-176) definisi kinerja adalah sebagai berikut :

> **"*Performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya**

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral maupun etika".

Menurut Hayadi dan Kristiani (2007:103) definisi kinerja adalah sebagai berikut :

"Kinerja merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visiorganisasi".

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang mempuyai tujuan strategis organisasi. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sebagai dasar bagi pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Darma (2005) bahwa faktor-faktor tingkat kinerja staf meliputi:mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementarakarakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur, jenis kelamin,pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan kerja, atasan,organisasi, penghargaan dan imbalan).

Gibson yang dikutip oleh Sucipto menyatakan terdapat tiga kelompok variabel yangmempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu:

1. "Variabel individu yang meliputi kemampuan dan keterampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur dan

jenis kelamin, asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dankinerja,

2. Variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan, strukturdan desain pekerjaan,
3. Variabel psikologis, yakni persepsi, sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang komplek dan sulit diukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung kedalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda satu sama lainnya".

Uraian dari variabel kinerja dapat dilihat sebagaiberikut:

1. Tanggungjawab: adalah kesanggupan seorang akuntan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
2. Inisiatif: adalah prakarsa atau kemampuan seorang akuntan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dariatasan.
3. Jumlah pekerjaan: variabel ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa pekerjaan itu berbeda-beda satu sama lain dimana beberapa diantaranya lebih menarik dan menantang dibanding lainnya.

Menurut Mangkunegara (2000:68) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

a. "Faktor kemampuan
   Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya.
b. Faktor motivasi

> Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal".

Dari faktor-faktor diatas disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja muncul dalam karakteristik perorangan, yaitu dimulai dengan fakor lingkungan dan kemapuannya yang sangat berpengaruh karena dari sana akan ditemukan semangat dan motivasi, sehingga dalam pekerjaannya tumbuh rasa tanggung jawab agar targetnya dapat tercapai.

2.1.2.3 Pengertian Kinerja Keuangan

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan.

Pengertian kinerja keuangan Menurut Mulyadi (2005:418) adalah sebagai berikut :

> **"Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba".**

Adapun menurut Sucipto (2007:29) definisi kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen”.

Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

2.1.2.4 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

“**Pengertian kinerja Keuangan pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja**

diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi".

Adapun menurut Sucipto (2005:36) Kinerja keuangan pemerintah daerah didefiniskan sebagai berikut :

"Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran".

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.1.2.5 Pengertian Penilaian Kinerja

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer, karena dari informasi tersebut akan dilakukan penilaian kinerja. Pada dasarnya penilaian kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggungjawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya

tanggungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada yang dapat diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur.

Menurut Henry Simamora (2004:338) penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

> **"Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan".**

Adapun menurut Rivai dan Basri (2004:14) pengertian dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

> **"Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada".**

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah ukuran keberhasilan individu dalam menjalankan tugasnya.

2.1.3 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari anggaran adalah sebagai alat pembanding dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terkendali pelaksanaan tersebut.

Menurut Henry Simamora (2007:202) pengertian anggaran adalah sebagai berikut :

> **"Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi : anggaran mengidentifikasi sumber daya komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan".**

Adapun menurut M. Munandar (2006:201) definisi anggaran adalah sebagai berikut :

> **"Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang".**

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam unit (kesatuan) moneter dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan komponen dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor pemerintahan.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, dan laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

a. “telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.1.3.2 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Laporan realisasi anggaran adalah :

> **“Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu”.**

Menurut PSAK No. 2 Tahun 2004 Tentang Standar Laporan Keuangan, laporan realisasi anggaran adalah sebagai beikut :

> **“Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode”.**

2.1.3.3 Isi laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP No. 2 Tahun 2005 isi laporan realisasi anggaran mencakup hal sebagi berikut :

1. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
2. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
3. Laporan realisasi anggaran disajikan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.3.4 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP No. 2 Tahun 2005 tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD/OPD, PPKD, danPemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

2.1.3.5 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP No. 2 Tahun 2005 manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
   a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2.1.3.6 Periode Pelaporan

Menurut PSAP No. 2 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan

suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.3.7 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Manajemen keuangan daerah, khususnya manajemen anggaran daerah (APBD) dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Karena adanya tuntutan pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah (APBD) pemerintah daerah haruscermatdalam pengelolaan semua pendapatan/penerimaan dan pengeluaran kas daerah sehingga dapat meminimalkan jumlah kas yang mengganggur serta dapat mencegah terjadinya kekurangan kas.

Menurut Redaksi Great Publisher (2009:208), APBD didefinisikan sebagai berikut :

> **"APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah."**

Adapun menurut Slamet Suwiaty (2006:55) APBD diartikan sebagai berikut :

"APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah."

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan dokumen yang berisi perencannan tentang keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah di samping harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM, komitmen dan perangkat pendukung yang mampu dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep-konsep akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.3.8 Struktur APBD

Menurut Indra Bastian (2005:189) struktur APBD meliputi tiga kelompok, yaitu :

1. **"Pendapatan**
2. **Belanja, dan**
3. **Pembiayaan."**

Pengertian dari pos-pos diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan/lembaga dari aktivitasnya.
2. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pos-pos yang harus dipenuhi dalam laporan realisasi APBD, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **"Pendapatan**
2. **Belanja, dan**
3. **Pembiayaan (*financing*)."**

Adapun penjelasan dari pos-pos diatas adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan/lembaga dari aktivitasnya.Pendapatan Daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalkan kemakmuran rakyat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokan menjadi beberapa kelompok, yaitu :
   a. Belanja Administrasi Umum

      Semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Diantaranya Belanja

Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan.

- Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja Pegawai meliputi biaya gaji dan tunjangan, Biaya perawatan dan pengobatan, dan biaya pengembangan sumber daya manusia.
- Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Belanja Barang meliputi biaya jasa kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta penunjang administrasi kantor. Contohnya biaya kawat dan faks dan biaya pengiriman.
- Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Diantaranya Biaya pemeliharaan gedung kantor, Biaya pemeliharaan rumah dinas dan asrama, Biaya pemeliharaan meubelair, Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor, dan biaya pemeliharaan peralatan kantor.
- Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini terdiri atas :

- ✓ Biaya perjalanan dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah.
- ✓ Biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan bagi pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah.
- ✓ Biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiun dalam daerah, biaya pemulangan dipensiun luar daerah, dan biaya pemulangan pegawai yang gugur.

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publikmerupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik, diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan.

c. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Diantaranya Angsuran Pinjaman, Dana Bantuan, dan Dana Cadangan.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan- kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

e. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

- Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik : pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
- Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dari pos-pos diatas ditarik kesimpulan bahwa struktur laporan realisasi APBD terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1.3.9 Pengertian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi dapat diartikan sebagai tindakan nyata dalam anggaran keuangan. Di dalam pemerintahan, dana yang diterima dalam suatu kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata realisasi didefinisikan sebagai berikut :

> **"realisasi adalah menjadi nyata, perwujudan menjadi nyata (mengusahakan melaksanakan menjadi nyata)".**

Adapun menurut Permendagri No. 13 Tahun 2007 ayat 4 bahwa realisasi APBD didefinisikan sebagai berikut :

> **"Realisasi APBD adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan diwujudkan menjadi nyata, agar rencana yang telah disusun oleh perusahaan dapat terwujud".**

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa realisasi merupakan suatu pelaksanaan yang diwujudkan untuk melakukan suatu kegiatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengantugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pekerjaan yang dipengaruhi oleh motivasi. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) bahwa **"Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya"**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu analisa dari interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu kegiatan.

Untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan keuangan. Pencermatan perlu dilakukan terhadapa setiap elemen (pos) yang dilaporkan. Pencermatan yang dimaksud meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen (pos) yang dilaporkan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara meneliti setiap elemen, membandingkan nilai elemen tertentu dengan elemen lainnya untuk menghasilkan angka rasio keuangan, serta memprediksi kondisi dimasa datang. Selain dari itu laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi seluas mungkin kepada pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara luas akan berdampak pada penilaian terhadap pemerintah menjadi baik karena telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik. Hal ini tentu akan meningkatkan nilai atau indeks pemerintah daerah dalam penerapan *good governance*.

Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

